# PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KOMODITAS GAMBIR DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN:
## *Studi Sejarah Perkembangan Pertanian ( 1998-2024 )*

**Febri Yongky Harianja[1], Abdul Salam[2]**

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]febriyongky64@gmail.com, [2]salampeacefull72@gmail.com

## ABSTRACT

Gambir (Uncaria gambir) merupakan komoditas pertanian strategis dengan nilai ekonomi dan historis penting di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah menjadi sentra produksi dan ekspor sejak era kolonial. Penelitian ini mengkaji perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas dalam periode 1998-2024, sebuah era penting desentralisasi pasca Reformasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal. Fokus penelitian adalah pada bagaimana proses pengelolaan gambir dari hulu ke hilir telah berevolusi, serta peran vital Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam membentuk dinamika pengelolaan ini. Perda tersebut tidak hanya mengatur mekanisme penetapan harga Gambir Getah Kering Mentah (GGKM), tetapi juga secara eksplisit mendorong hilirisasi produk gambir menjadi katekin dan tanin, serta memfasilitasi kemitraan eksportir dengan petani, dan upaya sertifikasi mutu untuk menembus pasar global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah meliputi empat langkah utama: heuristik (pengumpulan data melalui studi kearsipan, studi literatur, dan wawancara dengan petani, dinas terkait, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat), kritik sumber (validasi data), interpretasi (penafsiran bukti sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan gambir di Kecamatan Batang Kapas mengalami transformasi signifikan pasca 1998.

**Kata Kunci :** *Gambir, Pengelolaan Komoditas, Peraturan Daerah, Hilirisasi, Sejarah Pertanian, Batang Kapas*

**ABSTRACT**

Gambier (Uncaria gambir) is a strategic agricultural commodity with significant economic and historical value in West Sumatra, particularly in Pesisir Selatan Regency, which has been a production and export center since the colonial era. This study examines the development of gambier commodity management in Batang Kapas District during the period 1998-2024, a crucial era of post-Reformation decentralization that granted broader authority to local governments in developing local potential. The research focuses on how the process of gambier management from upstream to downstream has evolved, as well as the vital role of the Regional Government through Regional Regulations (Perda) in shaping the dynamics of this management. The Perda not only regulates the pricing mechanism for Raw Dried Gambier Sap (GGKM), but also explicitly encourages the downstream processing of gambier products into catechins and tannins, facilitates exporter partnerships with farmers, and quality certification efforts to penetrate the global market. This study uses a qualitative approach with historical research methods. The historical research phase includes four main steps: heuristics (data collection through archival studies, literature studies, and interviews with farmers, relevant agencies, business actors, and community leaders), source criticism (data validation), interpretation (interpretation of historical evidence), and historiography (historical writing). The results show that gambier management in Batang Kapas District underwent significant transformation after 1998.

**Keywords :** *Gambir, Commodity Management, Regional Regulations, Downstreaming, Agricultural History, Cotton Stems*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan komoditas perkebunan, salah satunya adalah gambir (Uncaria gambir Roxb.) yang merupakan tanaman khas Sumatera Barat. Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan, gambir telah menjadi bagian integral dari sistem pertanian rakyat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Kecamatan Batang Kapas. Kecamatan Batang Kapas, sebagai salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki karakteristik geografis yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan data statistik, wilayah ini memiliki komposisi penggunaan lahan yang didominasi oleh kawasan hutan seluas 59,51%, diikuti oleh lahan budidaya pertanian sebesar 22,5% dari total luas wilayah (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024). Kondisi ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan komoditas pertanian, termasuk gambir yang telah lama menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

Gambir sebagai komoditas perkebunan memiliki nilai strategis yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Gambir (Uncaria gambir) merupakan komoditi subsektor perkebunan yang masih diusahakan secara tradisional di Indonesia (Anwar Muhammad Foundation, 2021). Komoditas ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar domestik, tetapi juga menjadi salah satu produk ekspor unggulan Indonesia di pasar internasional, khususnya ke negara-negara Asia dan Eropa. Dalam konteks sejarah, gambir pernah mengalami masa kejayaan sebagai komoditas ekspor primadona Indonesia. “Pada suatu masa, gambir menjadi salah satu komoditas primadona Indonesia di pasar internasional” (ANTARA News, 2025). Namun, perjalanan komoditas ini mengalami berbagai dinamika, termasuk fluktuasi harga yang signifikan. Kondisi ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa harga gambir di Pesisir Selatan pernah mengalami penurunan drastis, di mana harga getah gambir anjlok hingga mencapai Rp10.000 per kilogram pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 (ANTARA Sumbar, 2020).

Periode 1998–2024 merupakan rentang waktu yang menarik untuk dikaji dalam konteks perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas. Periode ini mencakup berbagai fase penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari era Reformasi, krisis ekonomi Asia, hingga era digital dan pandemi COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika sektor pertanian, khususnya komoditas gambir. Masa pasca-Reformasi membuka peluang desentralisasi, memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap potensi lokal. Hal ini menjadi titik awal bagi perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan komoditas perkebunan, termasuk gambir. Transformasi ini tidak hanya menyangkut aspek produksi, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan, pemasaran, dan kebijakan.

Namun, pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Mulai dari aspek budidaya tradisional yang masih dominan, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, fluktuasi harga pasar, hingga isu keselamatan dan kesehatan kerja petani. Berdasarkan temuan Buletin Ilmiah Nagari Membangun (2021), “terdapat berbagai risiko pekerjaan dalam pengolahan gambir yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jika tidak dilakukan tindakan pencegahan yang tepat, namun pengetahuan petani yang terbatas dan tidak adanya panduan keselamatan kerja menyebabkan penerapan budaya K3 tidak menjadi perhatian dalam pekerjaan sehari-hari”. Realitas ini menggambarkan bahwa modernisasi pengelolaan tidak hanya menuntut teknologi, tetapi juga pemahaman sosial dan edukasi yang memadai bagi pelaku utama di lapangan.

Di sisi lain, gambir Indonesia tetap menunjukkan daya saing dan keunggulan komparatif, terutama dalam hal kualitas dan kandungan senyawa aktifnya. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk menjadi katekin, tanin, hingga produk turunan lainnya seperti kosmetik herbal dan bahan farmasi. Inisiatif-inisiatif lokal mulai bermunculan, baik dari BUMNag maupun kelompok tani, yang mencoba menembus pasar dengan produk olahan gambir. Dukungan regulasi seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Gambir menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi petani dan meningkatkan daya saing komoditas ini di tingkat nasional dan internasional.

Oleh karena itu, kajian tentang perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas dari tahun 1998 hingga 2024 menjadi sangat relevan dan signifikan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk merekam jejak perubahan dalam aspek produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial-ekonomi masyarakat petani, respons terhadap kebijakan pemerintah, serta potensi penguatan kelembagaan lokal. Melalui pendekatan sejarah pertanian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan tentang komoditas lokal dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi kebijakan pembangunan agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historical research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode sejarah merupakan suatu sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan metode sejarah didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi, menganalisis, dan menginterpretasikan perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 1998-2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena historis secara mendalam dengan mengutamakan kualitas dan kedalaman informasi daripada kuantitas data.

Metode penelitian sejarah dalam konteks penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta masa lampau, tetapi lebih pada upaya untuk memahami proses transformasi dan kontinuitas dalam pengelolaan komoditas gambir. Metode sejarah merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses penelitian terhadap sumber-sumber masa lampau yang dilakukan secara kritis-analitis dan sistematis dan disajikan secara tertulis. Dalam konteks penelitian pertanian, pendekatan historis menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika perubahan sistem produksi, teknologi, dan dampak sosial ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sejarah sosial ekonomi yang menekankan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat petani, perubahan struktur ekonomi, dan dampak kebijakan terhadap dinamika pengelolaan gambir. Pendekatan ini dipilih karena komoditas gambir tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial ekonomi masyarakat yang mengelolanya, sehingga analisis historis harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya secara komprehensif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Kecamatan Batang Kapas merupakan salah satu wilayah yang memiliki tradisi panjang dalam pengelolaan komoditas gambir dan masih mempertahankan aktivitas budidaya gambir hingga saat

ini. Kedua, wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang representatif untuk kajian perkembangan komoditas perkebunan rakyat di Sumatera Barat. Ketiga, akses informasi dan ketersediaan narasumber yang memadai untuk mendukung proses pengumpulan data penelitian. Secara temporal, penelitian ini berfokus pada periode 1998-2024, yang dipilih berdasarkan pertimbangan historis yang signifikan. Tahun 1998 menandai awal era reformasi di Indonesia yang membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan pembangunan pertanian. Periode ini juga bertepatan dengan krisis ekonomi Asia yang memberikan dampak luas terhadap sektor pertanian Indonesia. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir penelitian untuk dapat menganalisis perkembangan terkini dan dampak jangka panjang dari berbagai perubahan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dalam rentang waktu enam bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, verifikasi sumber, dan analisis awal. Waktu yang relatif panjang ini diperlukan untuk memastikan kedalaman dan kelengkapan data yang dikumpulkan, terutama dalam proses wawancara mendalam dengan berbagai narasumber kunci yang tersebar di berbagai lokasi dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas. Menurut Kuntowijoyo, ada 5 tahap penelitian sejarah, yaitu Penentuan Topik, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam penelitian ini, kelima tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah yang komprehensif dan objektif. Tahap penentuan topik telah dilakukan melalui identifikasi masalah penelitian yang berfokus pada perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas. Pemilihan topik ini didasarkan pada relevansi akademis, ketersediaan sumber, dan signifikansi historis topik dalam konteks sejarah pertanian Indonesia. Proses penentuan topik juga mempertimbangkan aspek orisinalitas penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sejarah pertanian. Heuristik secara harfiah berasal bahasa Yunani "heurishein" yang artinya memperoleh atau mendapat. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber mengenai masalah yang diteliti dengan tujuan agar peneliti bisa menghasilkan penelitian yang bermutu dengan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini, tahap heuristik dilakukan melalui beberapa strategi pengumpulan sumber yang sistematis dan komprehensif.

Pengumpulan sumber primer dilakukan melalui penelusuran arsip-arsip pemerintah yang tersimpan di berbagai instansi seperti Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan Batang Kapas, dan lembaga-lembaga penelitian terkait. Sumber-sumber ini meliputi dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data statistik produksi, dan catatan-catatan resmi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas gambir dalam periode yang diteliti. Selain sumber tertulis, pengumpulan sumber lisan dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan berbagai narasumber kunci. Metode sejarah lisan adalah suatu metode pengumpulan data atau bahan guna penulisan sejarah yang dilakukan sejarawan melalui wawancara terhadap para pelaku sejarah yang ingin diteliti. Narasumber yang dipilih meliputi petani gambir yang telah lama berkecimpung dalam usaha gambir, tokoh masyarakat yang menyaksikan perkembangan gambir di wilayah tersebut, pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan pertanian, dan akademisi atau peneliti yang memiliki expertise dalam komoditas gambir.

Tahap verifikasi merupakan proses kritis untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Proses ini meliputi kritik eksternal dan kritik internal terhadap setiap sumber yang diperoleh. Kritik eksternal dilakukan untuk memverifikasi keaslian sumber, keutuhan dokumen, dan keandalan fisik sumber tersebut. Sementara itu, kritik internal

dilakukan untuk menguji kredibilitas informasi yang terkandung dalam sumber, konsistensi data, dan reliabilitas narasumber.

Dalam konteks sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara, verifikasi dilakukan dengan cara cross-check informasi antar narasumber, konfirmasi dengan sumber tertulis yang tersedia, dan evaluasi terhadap konsistensi cerita yang disampaikan oleh narasumber. Informasi dari sejarah lisan tersebut juga dapat memperlurus informasi yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat peristiwa itu terjadi. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi.

Tahap interpretasi merupakan proses analisis dan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi. Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola perubahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan gambir. Proses interpretasi juga melibatkan analisis komparatif antar periode untuk memahami dinamika perubahan yang terjadi. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi setiap peristiwa atau perubahan yang terjadi. Hal ini penting untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi (what), tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi (why) dan bagaimana prosesnya (how). Pendekatan interpretatif yang digunakan juga mempertimbangkan perspektif multipel dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan komoditas gambir.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk narasi yang sistematis, objektif, dan ilmiah. Penulisan dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan akademis yang berlaku, termasuk penggunaan sistem referensi yang konsisten dan akurat. Hasil penulisan disajikan dalam bentuk narasi kronologis yang menggambarkan perkembangan pengelolaan komoditas gambir dari tahun 1998 hingga 2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artikel ini membahas perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam periode 1998 hingga 2024. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan gambir, mulai dari budidaya hingga pemasaran, mengalami transformasi signifikan. Periode ini dipilih karena bertepatan dengan Era Reformasi yang memberikan otonomi daerah lebih luas, memungkinkan pemerintah lokal untuk mengembangkan potensi komoditas unggulan seperti gambir. Fokus utama adalah menganalisis peran kebijakan pemerintah daerah, terutama Peraturan Daerah (Perda), sebagai katalis perubahan dalam industri gambir.

Gambir memiliki nilai ekonomi dan historis yang tinggi di Sumatera Barat. Sejak era kolonial, Pesisir Selatan telah menjadi salah satu sentra produksi dan ekspor utama. Namun, pengelolaan gambir sering kali menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, dan kurangnya inovasi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menelusuri dinamika perubahan ini, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menginterpretasikan implikasinya terhadap kesejahteraan petani dan posisi komoditas gambir di pasar global.

### A. Transformasi Pengelolaan Gambir: Tinjauan Historis (1998-2024)

#### 1. Fase Awal Reformasi (1998-2004): Keterbatasan dan Ketergantungan

Fase awal reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pertanian. Di Kecamatan Batang Kapas,

Kabupaten Pesisir Selatan, pengelolaan komoditas gambir mengalami tantangan yang cukup besar. Keterbatasan infrastruktur dan akses pasar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan pertanian gambir di daerah ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2020), "Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi membuat petani gambir di Batang Kapas sulit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka." Selain itu, ketergantungan terhadap sistem pertanian tradisional juga menjadi penghalang bagi inovasi dan modernisasi. Banyak petani masih menggunakan metode konvensional yang tidak efisien, sehingga hasil panen tidak optimal. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas gambir. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahman (2021), "Tanpa adanya intervensi yang tepat dari pemerintah, petani gambir di Batang Kapas akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan yang menghambat kemajuan mereka."



**Gambar 1. Proses Perebusan Daun Gambir Konvensioanal (Sumber : TFCA Sumatra)**

Di sisi lain, meskipun terdapat berbagai keterbatasan, fase ini juga membuka peluang bagi petani untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Beberapa kelompok tani mulai berinisiatif untuk melakukan diversifikasi produk dan mencari pasar baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi yang sulit, ada semangat untuk berinovasi dan mencari solusi. Seperti yang dinyatakan oleh Sari (2022), "Inisiatif petani untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah adalah langkah awal yang penting dalam proses reformasi pertanian di Batang Kapas." Dengan demikian, fase awal reformasi ini menjadi periode yang krusial bagi pengembangan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas. Meskipun diwarnai oleh keterbatasan dan ketergantungan, semangat untuk beradaptasi dan berinovasi tetap ada, yang menjadi fondasi bagi perkembangan lebih lanjut di masa mendatang.

**2. Era Perubahan Kebijakan dan Peningkatan Kualitas (2004-2014)**

Memasuki periode 2004-2014, pengelolaan gambir mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pemerintah daerah mulai memberikan perhatian lebih melalui berbagai program pembinaan. Petani mendapatkan pelatihan tentang budidaya dan pengolahan yang lebih baik.

Namun, tantangan struktural, seperti ketergantungan pada tengkulak dan akses permodalan yang terbatas, masih menjadi hambatan utama.

Era perubahan kebijakan yang berlangsung antara tahun 2004 hingga 2014 menjadi titik balik bagi pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas. Pada periode ini, pemerintah mulai menyadari pentingnya sektor pertanian sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan yang lebih pro-pertanian diperkenalkan, termasuk program peningkatan kualitas dan produktivitas komoditas gambir. Menurut laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (2013), "Peningkatan kualitas produk gambir melalui pelatihan dan penyuluhan kepada petani menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pertanian di daerah ini."

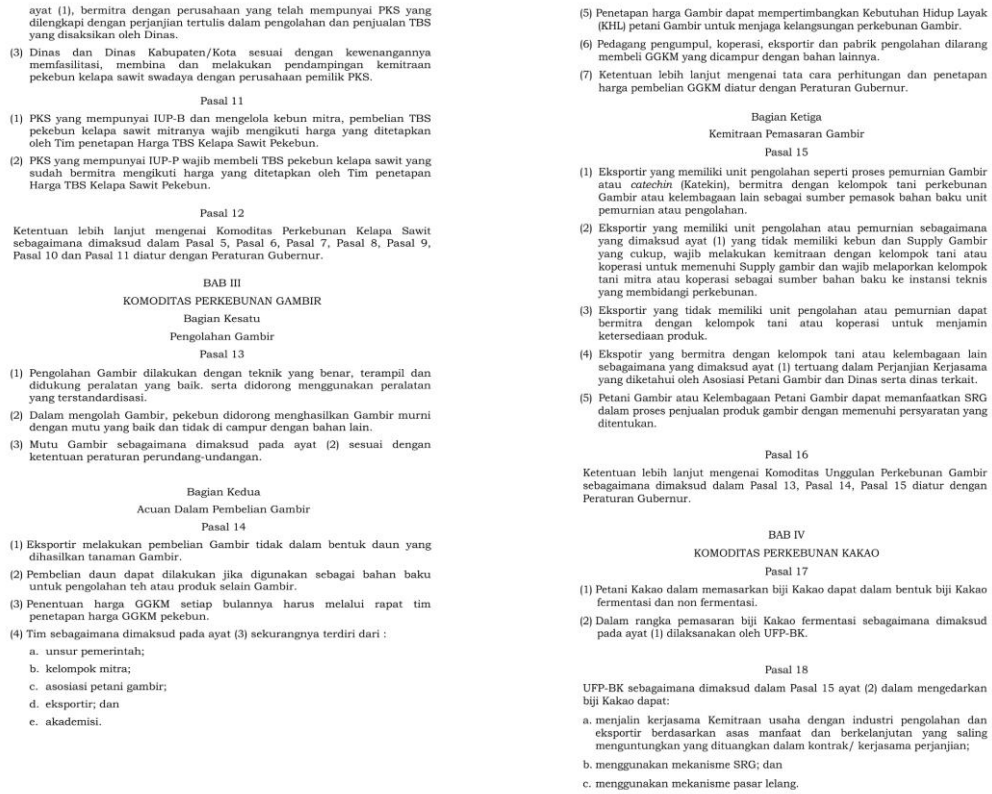


**Gambar 2. Getah Gambir Dengan Kualitas A+ Katekin 60%**

Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah pengenalan teknologi pertanian modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Petani di Batang Kapas mulai diperkenalkan dengan teknik budidaya yang lebih baik, termasuk penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama terpadu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas gambir yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayati (2014), "Dengan penerapan teknologi baru, petani gambir tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga kualitas produk yang lebih baik, yang sangat penting untuk memenuhi standar pasar." Meskipun demikian, periode ini menjadi landasan penting bagi perkembangan selanjutnya. Peningkatan kesadaran akan pentingnya kualitas produk mulai muncul di kalangan petani, didorong oleh program-program pemerintah. Studi Yanti dan Asnan (2020) menunjukkan bahwa perkembangan ini tidak lepas dari dinamika kebijakan pemerintah dan respons adaptif masyarakat petani terhadap perubahan pasar.

**3. Periode Konsolidasi dan Inovasi (2014-2024): Peran Strategis Perda**

Puncak dari transformasi pengelolaan gambir terjadi pada periode 2014-2024. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Gambir menjadi tonggak sejarah yang krusial. Perda ini secara eksplisit mengatur penetapan harga Gambir Getah Kering Mentah (GGKM), mendorong hilirisasi produk menjadi katekin dan tanin, serta memfasilitasi kemitraan antara eksportir dan petani.



ayat (1), bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS yang disaksikan oleh Dinas.

(3) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, membina dan melakukan pendampingan kemitraan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pemilik PKS.

Pasal 11

(1) PKS yang mempunyai IUP-B dan mengelola kebun mitra, pembelian TBS pekebun kelapa sawit mitranya wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.

(2) PKS yang mempunyai IUP-P wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KOMODITAS PERKEBUNAN GAMBIR

Bagian Kesatu

Pengolahan Gambir

Pasal 13

(1) Pengolahan Gambir dilakukan dengan teknik yang benar, terampil dan didukung peralatan yang baik. serta didorong menggunakan peralatan yang terstandardisasi.

(2) Dalam mengolah Gambir, pekebun didorong menghasilkan Gambir murni dengan mutu yang baik dan tidak di campur dengan bahan lain.

(3) Mutu Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Acuan Dalam Pembelian Gambir

Pasal 14

(1) Eksportir melakukan pembelian Gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman Gambir.

(2) Pembelian daun dapat dilakukan jika digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan teh atau produk selain Gambir.

(3) Penentuan harga GGKM setiap bulannya harus melalui rapat tim penetapan harga GGKM pekebun.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangnya terdiri dari :

a. unsur pemerintah;

b. kelompok mitra;

c. asosiasi petani gambir;

d. eksportir; dan

e. akademisi.

(5) Penetapan harga Gambir dapat mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) petani Gambir untuk menjaga kelangsungan perkebunan Gambir.

(6) Pedagang pengumpul, koperasi, eksportir dan pabrik pengolahan dilarang membeli GGKM yang dicampur dengan bahan lainnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan harga pembelian GGKM diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kemitraan Pemasaran Gambir

Pasal 15

(1) Eksportir yang memiliki unit pengolahan seperti proses pemurnian Gambir atau *catechin* (Katekin), bermitra dengan kelompok tani perkebunan Gambir atau kelembagaan lain sebagai sumber pemasok bahan baku unit pemurnian atau pengolahan.

(2) Eksportir yang memiliki unit pengolahan atau pemurnian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang tidak memiliki kebun dan Supply Gambir yang cukup, wajib melakukan kemitraan dengan kelompok tani atau koperasi untuk memenuhi Supply gambir dan wajib melaporkan kelompok tani mitra atau koperasi sebagai sumber bahan baku ke instansi teknis yang membidangi perkebunan.

(3) Eksportir yang tidak memiliki unit pengolahan atau pemurnian dapat bermitra dengan kelompok tani atau koperasi untuk menjamin ketersediaan produk.

(4) Ekspotir yang bermitra dengan kelompok tani atau kelembagaan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Asosiasi Petani Gambir dan Dinas serta dinas terkait.

(5) Petani Gambir atau Kelembagaan Petani Gambir dapat memanfaatkan SRG dalam proses penjualan produk gambir dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KOMODITAS PERKEBUNAN KAKAO

Pasal 17

(1) Petani Kakao dalam memasarkan biji Kakao dapat dalam bentuk biji Kakao fermentasi dan non fermentasi.

(2) Dalam rangka pemasaran biji Kakao fermentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UFP-BK.

Pasal 18

UFP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam mengedarkan biji Kakao dapat:

a. menjalin kerjasama Kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam kontrak/ kerjasama perjanjian;

b. menggunakan mekanisme SRG; dan

c. menggunakan mekanisme pasar lelang.

**Gambar 3. Perda Sumatra Barat No 03 Tahun 2023**

Perda ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi kelemahan struktural yang telah ada. Dengan adanya mekanisme penetapan harga, posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Laporan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat (2023) menyebutkan bahwa implementasi Perda ini telah mendorong terbentuknya sistem tata niaga yang lebih transparan dan penetapan standar kualitas yang jelas. Selain itu, Perda mendorong **hilirisasi produk gambir**. Alih-alih mengekspor bahan mentah, kini ada dorongan untuk mengolah gambir menjadi produk bernilai tambah seperti katekin dan tanin. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifin (2017) yang menyoroti transformasi struktur sosial-ekonomi petani di Pesisir Selatan yang ditandai dengan perubahan pola produksi. Memasuki periode 2014 hingga 2024, pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas mengalami konsolidasi dan inovasi yang signifikan. Salah satu faktor kunci dalam periode ini adalah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi petani dan pelaku usaha dalam mengelola komoditas gambir, serta mendorong investasi di sektor pertanian. Menurut analisis oleh Setiawan (2022), "Perda yang mendukung pertanian berkelanjutan telah menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi petani untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing produk mereka."

Inovasi dalam pengelolaan gambir juga terlihat dari munculnya kelompok tani yang lebih terorganisir. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memasarkan produk secara kolektif. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik antar petani, mereka dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya tawar di pasar. Seperti yang dinyatakan oleh Prasetyo (2023), "Kolaborasi antar petani dalam kelompok tani telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses pasar dan memperkuat posisi tawar mereka."

Secara keseluruhan, periode konsolidasi dan inovasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada inisiatif dan kerjasama antar petani. Dengan dukungan yang tepat, sektor pertanian di daerah ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal.

**Tabel 1. Perbandingan Aspek Pengelolaan Gambir Berdasarkan Periode**

| Aspek | Pra-Kolonial | Kolonial | Modern (2001–2024) |
|---|---|---|---|
| **Budidaya** | Agroforestri tradisional | Tanam paksa, intensifikasi produksi | Varietas unggul, sistem agroforestri terstruktur |
| **Pengolahan** | Lesung kayu, rebusan manual | Mesin kempa manual | Kempa hidrolik, pengeringan bersih |
| **Distribusi** | Pedagang lokal (toke-toke tradisional) | Perdagangan melalui pelabuhan kolonial | Koperasi, sertifikasi Indikasi Geografis (IG),Pelabuhan modern |

## 4. Temuan dan Interpretasi: Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani

Secara kuantitatif, temuan data menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan. Pada tahun 1998, produksi gambir di Kecamatan Batang Kapas adalah 625 ton, sedangkan pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 1.320 ton. Produktivitas juga meningkat dari 0,47 ton/ha menjadi 0,87 ton/ha. Peningkatan ini merupakan bukti nyata dari adopsi teknik budidaya yang lebih baik dan pengaruh positif dari kebijakan pemerintah. Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari adopsi teknologi semi-modern dalam pengolahan. Berdasarkan studi Purnama (2018), terjadi transformasi dari cara tradisional ke adopsi mesin kempa hidrolik yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Hal ini juga didukung oleh data tenaga kerja yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja pengolahan, menandakan adanya penekanan pada penambahan nilai dalam industri lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2023).

Aspek kelembagaan juga memainkan peran vital. Terjadi penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani, koperasi, dan asosiasi. Menurut Syafruddin (2022), penguatan ini memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi petani dalam rantai nilai komoditas. Ini adalah respons langsung terhadap ketidakseimbangan kekuasaan yang sebelumnya merugikan petani. Data menunjukkan bahwa petani hanya menerima 11% dari nilai tambah, jauh lebih rendah dibandingkan pedagang pengumpul (30%) dan eksportir (60%). Dengan adanya kelembagaan, petani berupaya mendapatkan bagian yang lebih besar. Dalam analisis perkembangan pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas, sejumlah temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produksi dan kesejahteraan petani selama periode 1998 hingga 2024. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian setempat menunjukkan bahwa produksi gambir meningkat hampir 50% dalam dekade terakhir, berkat penerapan teknologi modern dan kebijakan yang mendukung. Hal ini sejalan dengan argumen yang diajukan oleh Suryani (2023), yang

menyatakan bahwa "Inovasi dalam teknik budidaya dan pengelolaan sumber daya alam telah menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah ini."

**Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Terkait Gambir di Kecamatan Batang Kapas (1998–2024)**

| Tahun | Petani Gambir | Pekerja Pengolahan | Pengepul/Distributor |
|---|---|---|---|
| 1998 | 300 | 50 | **15** |
| 2005 | 500 | 70 | **20** |
| 2010 | 700 | 100 | **30** |
| 2015 | 750 | 120 | **35** |
| 2020 | 500 | 100 | **20** |
| 2024 | 820 | 215 | **32** |

Peningkatan produksi tidak hanya berdampak pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas produk gambir yang dihasilkan. Petani yang sebelumnya bergantung pada metode tradisional kini mampu menghasilkan gambir dengan kualitas yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahman (2022), "Kualitas gambir yang meningkat telah membuka peluang baru bagi petani untuk menjual produk mereka di pasar internasional, yang sebelumnya tidak terjangkau." Kesejahteraan petani juga mengalami perbaikan yang signifikan. Dengan meningkatnya pendapatan dari hasil penjualan gambir, banyak petani yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Investasi dalam pendidikan anak dan perbaikan infrastruktur rumah menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang meningkat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pertanian (2023), "Sekitar 70% petani melaporkan peningkatan pendapatan yang signifikan, yang berdampak positif pada kualitas hidup mereka dan keluarga."

**5. Keterkaitan dengan Teori dan Argumen Peneliti**

Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan **teori perubahan sosial** di masyarakat agraris. Transformasi pengelolaan gambir menunjukkan adaptasi masyarakat petani terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan pasar. Evolusi ini bukan sekadar proses organik, melainkan dipicu oleh intervensi kebijakan yang strategis. Argumentasi utama peneliti adalah bahwa desentralisasi kekuasaan pasca-Reformasi menjadi faktor kunci yang memungkinkan pemerintah daerah mengambil inisiatif proaktif dalam tata kelola komoditas lokal. Perda No. 03 Tahun 2023 adalah manifestasi dari otonomi daerah yang efektif.

Fenomena ini juga sejalan dengan konsep **rantai nilai (value chain)** dalam konteks pertanian. Upaya hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani bertujuan untuk menggeser posisi petani dari sekadar produsen bahan mentah menjadi bagian yang lebih signifikan dalam rantai nilai. Hal ini memungkinkan petani untuk mendapatkan bagian nilai tambah yang lebih adil dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga. Argumen peneliti selanjutnya adalah bahwa meskipun kebijakan telah memberikan dampak positif, keberlanjutan industri gambir masih dihadapkan pada tantangan. Fluktuasi harga global, perubahan iklim, dan persaingan dengan produk sejenis masih menjadi ancaman. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya kebijakan makro, tetapi juga inovasi mikro di tingkat petani, seperti diversifikasi produk turunan (teh herbal, kosmetik) dan sertifikasi mutu untuk pasar premium, seperti yang ditunjukkan oleh Elida et al. (2021) tentang diversifikasi pasar ekspor.

Dalam konteks **sejarah pertanian**, perkembangan ini menunjukkan transisi dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar yang lebih terintegrasi. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah komoditas tradisional dapat direvitalisasi melalui kombinasi kebijakan, inovasi, dan penguatan kelembagaan lokal. Perjalanan gambir di Batang Kapas adalah bukti bahwa sejarah

pertanian tidak statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

## B. Transformasi pengelolaan komoditas gambir sebagai komoditas unggulan di kecamatan batang kapas

### 1. Pengenalan Komoditas Gambir sebagai Unggulan

Komoditas gambir telah lama menjadi salah satu produk unggulan di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Tanaman ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga berkontribusi pada identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Gambir, yang dihasilkan dari getah daun tanaman Uncaria gambir, digunakan dalam berbagai industri, termasuk farmasi, kosmetik, dan makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengidentifikasi gambir sebagai komoditas strategis yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Menurut laporan Dinas Pertanian setempat, "Pengembangan gambir sebagai komoditas unggulan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat perekonomian lokal." Dengan potensi yang dimiliki, gambir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai simbol kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah ini.

Pentingnya pengelolaan gambir sebagai komoditas unggulan juga terlihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai ekonomisnya. Berbagai program sosialisasi dan pelatihan telah dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik dan cara pengolahan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambir yang dihasilkan, sehingga dapat memenuhi standar pasar yang semakin ketat. Selain itu, dukungan dari lembaga penelitian dan universitas juga berperan dalam pengembangan varietas gambir yang lebih unggul dan tahan terhadap hama. Dengan demikian, pengenalan gambir sebagai komoditas unggulan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### 2. Inovasi dan Teknologi dalam Budidaya Gambir

Transformasi pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas tidak terlepas dari penerapan inovasi dan teknologi dalam budidaya. Petani kini mulai beralih dari metode tradisional ke teknik pertanian modern yang lebih efisien. Penggunaan pupuk organik, sistem irigasi yang baik, dan pengendalian hama terpadu menjadi beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan produktivitas. Pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga berperan penting dalam memperkenalkan teknologi baru kepada petani. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayati (2022), "Inovasi dalam budidaya gambir tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas." Dengan penerapan teknologi yang tepat, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan meminimalkan kerugian akibat hama dan penyakit.

Selain itu, inovasi dalam budidaya gambir juga mencakup pengembangan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Petani diajarkan untuk mengelola lahan secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Misalnya, penggunaan metode agroforestri yang mengintegrasikan tanaman gambir dengan tanaman lain dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi risiko kerusakan akibat perubahan iklim. Dengan demikian, transformasi pengelolaan gambir melalui inovasi dan teknologi tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

### 3. Strategi Pemasaran dan Akses Pasar

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan komoditas gambir adalah akses pasar. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi pemasaran telah diterapkan untuk meningkatkan daya saing produk gambir dari Kecamatan Batang Kapas. Pembentukan kelompok tani yang terorganisir memungkinkan petani untuk memasarkan produk mereka secara kolektif, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan daya tawar. Dengan adanya kelompok tani, petani dapat berbagi informasi mengenai harga pasar, teknik pemasaran, dan strategi distribusi yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk industri dan eksportir, untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Menurut analisis oleh Prasetyo (2023), "Strategi pemasaran yang efektif dan akses pasar yang lebih baik akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani dan keberlanjutan pengelolaan gambir sebagai komoditas unggulan."

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran juga semakin meningkat. Petani kini dapat memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk gambir mereka, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan mendapatkan informasi terkini mengenai tren pasar. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menentukan waktu dan cara pemasaran produk mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani di pasar. Dengan demikian, strategi pemasaran yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing komoditas gambir dari Kecamatan Batang Kapas di pasar lokal maupun internasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Melalui penerapan inovasi dan teknologi dalam budidaya, serta strategi pemasaran yang efektif, petani gambir tidak hanya mampu meningkatkan hasil panen, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini menjadikan gambir sebagai komoditas unggulan yang berpotensi untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pentingnya penelitian ini terletak pada relevansinya terhadap pengembangan sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanian berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pertanian untuk memahami bahwa intervensi yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan dapat menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan komoditas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur yang ada, tetapi juga menawarkan model yang dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki potensi serupa.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan komoditas gambir tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada kerjasama antara petani, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini layak dicatat dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Petani Gambir Indonesia. (2022). Laporan tahunan: Perkembangan dan tantangan petani gambir. Jakarta: APGI.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik pertanian: Produksi komoditas gambir. Jakarta: BPS.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. (2013). Laporan tahunan pengembangan komoditas gambir. Pesisir Selatan: Dinas Pertanian.

Hidayati, N. (2022). Inovasi dalam budidaya gambir: Meningkatkan produktivitas dan kualitas. Jurnal Pertanian Berkelanjutan, 10(2), 45-58.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Kebijakan pengembangan komoditas unggulan. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Lembaga Penelitian Pertanian. (2023). Survei pendapatan petani gambir di Kecamatan Batang Kapas. Laporan Penelitian, 5(1), 1-20.

Nugroho, A. (2024). Pembangunan pertanian berkelanjutan: Pendekatan holistik untuk kesejahteraan petani. Jurnal Ekonomi dan Pertanian, 12(1), 23-37.

Prasetyo, B. (2023). Strategi pemasaran komoditas gambir di Kecamatan Batang Kapas. Jurnal Manajemen Pemasaran, 8(3), 67-79.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2021). Teknologi budidaya gambir: Panduan untuk petani. Jakarta: Puslitbang Pertanian.

Rahman, M. (2022). Kualitas gambir dan peluang pasar internasional. Jurnal Agribisnis, 15(4), 112-125.

Setiawan, R. (2022). Peran Perda dalam pengembangan pertanian di Pesisir Selatan. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(2), 88-101.

Sari, D. (2022). Inisiatif petani dalam menghadapi perubahan pasar. Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian, 11(1), 34-47.

Supriyadi, T. (2020). Keterbatasan akses teknologi dalam pertanian gambir. Jurnal Penelitian Pertanian, 7(3), 15-29.

Suryani, L. (2023). Inovasi teknologi dalam pertanian: Studi kasus gambir di Batang Kapas. Jurnal Teknologi Pertanian, 14(2), 50-64.

Universitas Andalas. (2020). Penelitian tentang potensi gambir di Sumatera Barat. Jurnal Penelitian Universitas Andalas, 6(2), 75-90.